



## NOTA DINAS

Nomor B/ 8 / IJ-IND.2/PW/1/2022

Yth : Inspektur Jenderal  
Dari : Inspektur I  
Perihal : Penyampaian Laporan PP39 Triwulan IV Tahun 2021 Inspektorat I  
Lampiran : 3 (tiga) Berkas  
  
Tanggal : 6 Januari 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan PP39 Triwulan IV Inspektorat I Tahun 2021.

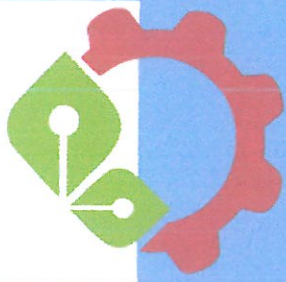
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Inspektur I

Wulan Aprilianti Permatasari

Tembusan:  
Sekretaris Itjen.





**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN  
PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI  
PELAKSANAAN  
RENCANA  
PEMBANGUNAN  
INSPEKTORAT I  
TAHUN 2021**

**INSPEKTORAT I  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, 3 Januari 2022**

**LAPORAN RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN  
INSPEKTORAT I  
TRIWULAN IV  
TAHUN 2022**



**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, 3 Januari 2022**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Inspektorat I dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2021.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama Triwulan IV Tahun 2021.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Inspektorat I atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang capaian kinerja Inspektorat I periode Triwulan IV Tahun 2021. Laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam merencanakan, melaksanakan pada periode berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, 3 Januari 2022

Inspektur I



Wulan Aprilianti Permatasari



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	3
C. Struktur Organisasi	4
<b>BAB II : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>6</b>
A. Program/Kegiatan Tahun 2021	6
B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	9
<b>BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>25</b>
A. Hasil yang Telah Dicapai	25
B. Analisis Capaian Kinerja	28
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	37
D. Langkah Tindak Lanjut	38
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
<b>LAMPIRAN : LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV INSPEKTORAT I TAHUN ANGGARAN 2021</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari 2 unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal di lingkungan yaitu 9 satuan kerja SMK, 12. satuan kerja Politeknik dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;



3. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat I bertanggungjawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

## B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2021 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.



### **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

#### **1. Subbagian Tata Usaha**

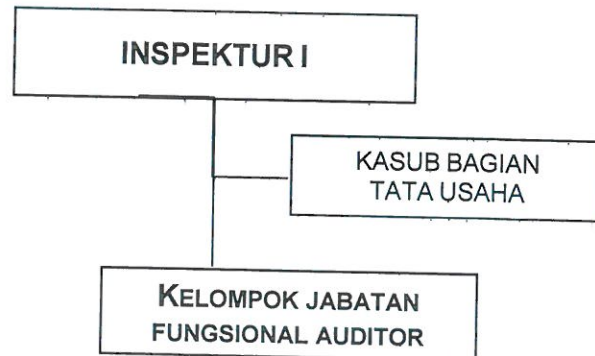
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat..

#### **2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.**

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat I Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Bagan struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari

1. Inspektur I

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang terdiri dari:

- a. Auditor Utama : 1 orang;
- b. Auditor Madya : 1 orang;
- c. Auditor Muda : 6 orang;
- d. Auditor Pratama : 7 orang.



## BAB II

### RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

#### A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1.	Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	4 Laporan	
2.	Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	121 Laporan	
3.	Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	121 Laporan	
4.	Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	1 Laporan	
5.	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I	1 Laporan	
6.	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	1 Laporan	

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat I pada tahun 2021 memiliki anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,- namun pada bulan Maret 2021 mengalami pemotongan anggaran penyediaan masker, sehingga anggaran yang tersedia menjadi **Rp 1.880.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2021

KODE	Uraian Program / Kegiatan / Output / Jenis Belanja	VOLUME	JUMLAH (Rp,-)
<b>1841</b>	<b>Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I</b>		<b>1.880.000.000</b>
<b>1841.TAK</b>	<b>Layanan Pengawasan Internal</b>		<b>1.880.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</b>	4 Laporan	<b>1.054.753.000</b>
<b>52</b>	<b>Audit Program Dan Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri</b>		<b>1.013.953.000</b>
A	Koordinasi Audit Kinerja Program Pengembangan Sdm Industri		30.000.000
B	Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan Sdm Industri		983.953.000
<b>53</b>	<b>Audit Khusus</b>		<b>26.200.000</b>
A	Koordinasi Dan Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu		26.200.000
<b>54</b>	<b>Tindak Lanjut Hasil Laporan Pemeriksaan</b>		<b>14.600.000</b>
A	Koordinasi Dan Pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit		14.600.000
<b>2</b>	<b>Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</b>	121 Laporan	<b>291.772.000</b>
<b>51</b>	<b>Reviu Lk-bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</b>		<b>232.572.000</b>
A	Koordinasi Pelaporan Keuangan Dan Bmn		32.000.000
B	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan/bmn		183.292.000
C	Pelaksanaan Reviu Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan		17.280.000
<b>52</b>	<b>Reviu Rka-ki Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</b>		<b>42.000.000</b>
A	Koordinasi Dan Pelaksanaan Reviu Rkaki		42.000.000
<b>53</b>	<b>Reviu Rk-bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</b>		<b>17.200.000</b>
A	Koordinasi Dan Pelaksanaan Reviu Rkbmn		17.200.000
<b>3</b>	<b>Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</b>	1 Laporan	<b>44.000.000</b>
<b>51</b>	<b>Monitoring Dan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</b>		<b>44.000.000</b>
A	Koordinasi Dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi Sakip		44.000.000



4	Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	1 Laporan	447.777.000
51	<i>Konsultasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</i>		447.777.000
A	Koordinasi Konsultasi Dan Pendampingan Pelaksanaan Manajemen Risiko Dan Kegiatan Berisiko Tinggi		10.000.000
B	Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi		92.352.000
C	Pembinaan Pengawasan Oleh Pimpinan		77.550.000
D	Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko		138.309.000
E	Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat I		129.566.000
5	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I	1 Laporan	32.298.000
51	<i>Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran</i>		32.298.000
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (pkpt) Inspektorat I		24.898.000
B	Penyusunan Anggaran Inspektorat I Tahun 2021		7.400.000
6	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	1 Laporan	9.400.000
51	<i>Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas</i>		9.400.000
A	Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya		2.000.000
B	Koordinasi Dan Penyusunan Lakip Inspektorat I		7.400.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.880.000.000</b>

Tabel 3. Revisi Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2021

Jenis Kegiatan		PAGU Anggaran
1	Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	788 241 000
2	Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	246 202 000
3	Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	44 000 000
4	Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	486 167 000
6	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I	32 070 000
6	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	8 320 000
<b>Total</b>		<b>1.605.000.000</b>

## B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat I yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I	IKU	1,4%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IK	8%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	85%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat	IKU	91%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I	IK	91,5%
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	77%
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	80%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%



TABEL PERHITUNGAN

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

Untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku

Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah kurang <1,4% dari satu koma empat persen.

$$x \leq 1,4\%$$

dimana

$$x = \frac{\Delta mt}{\Delta aa} \times 100\%$$

$x$	:	batas maksimum
$\Delta mt$	:	Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian Perindustrian yang bernilai uang
$\Delta aa$	:	total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I

Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I

**IKU**

8%

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun

$$x \leq 8\%$$

dimana

$$x = \frac{\Delta TPTD}{\Delta R} \times 100\%$$

$x$	:	batas maksimum
$\Delta TPTD$	:	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti
$\Delta R$	:	total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun



		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	85%									
		<p><b>Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas</b></p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;"><math>x \geq 85\%</math> dimana <math>x = \frac{\Delta AT}{\Delta AM} \times 100\%</math></p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><math>x</math></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta AT</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta AM</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem</td> </tr> </table>			$x$	:	batas maksimum	$\Delta AT$	:	Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi	$\Delta AM$	:	Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem
$x$	:	batas maksimum											
$\Delta AT$	:	Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi											
$\Delta AM$	:	Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem											
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat	IKU	91%									
		<p><b>Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satuan kerja dibagi dengan jumlah total rekomendasi</b></p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;"><math>x \geq 91\%</math> dimana <math>x = \frac{\Delta RAHP}{\Delta RHP} \times 100\%</math></p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><math>x</math></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta RAHP</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta RHP</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>total rekomendasi hasil pengawasan</td> </tr> </table>			$x$	:	batas maksimum	$\Delta RAHP$	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi	$\Delta RHP$	:	total rekomendasi hasil pengawasan
$x$	:	batas maksimum											
$\Delta RAHP$	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi											
$\Delta RHP$	:	total rekomendasi hasil pengawasan											
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	91,5%									
		<p><b>Hasil penilaian Maturitas SPIP berdasarkan quality Assurance BPKP terhadap Kementerian Perindustrian</b></p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;"><math>x \geq 91,5\%</math> dimana <math>x = \frac{\Delta SMRI}{\Delta SBI} \times 100\%</math></p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><math>x</math></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta SMRI</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai maturitas level 3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta SBI</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah satuan kerja binaan yang dinilai</td> </tr> </table>			$x$	:	batas maksimum	$\Delta SMRI$	:	Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai maturitas level 3	$\Delta SBI$	:	Jumlah satuan kerja binaan yang dinilai
$x$	:	batas maksimum											
$\Delta SMRI$	:	Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai maturitas level 3											
$\Delta SBI$	:	Jumlah satuan kerja binaan yang dinilai											

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL													
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%									
		Capaian Inspektorat I berdasarkan nilai yang didapatkan dari monitoring yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal											
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	76%									
		Menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKA-K/L											
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN													
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	70%									
		<p>Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">x \geq 70\%</math> <p>dimana</p> <math display="block">x = \frac{\Delta RSP}{\Delta RP} \times 100\%</math> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><math>x</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta RSP</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta RP</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah rencana Pengawasan</td> </tr> </table>			$x$	:	batas maksimum	$\Delta RSP$	:	Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	$\Delta RP$	:	Jumlah rencana Pengawasan
$x$	:	batas maksimum											
$\Delta RSP$	:	Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT											
$\Delta RP$	:	Jumlah rencana Pengawasan											
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%									
		<p>Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan dengan sertifikasi JFA</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">x \geq 80\%</math> <p>dimana</p> <math display="block">x = \frac{\Delta JFA}{\Delta JP} \times 100\%</math> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><math>x</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta JFA</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta JP</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah Penugasan pengawasan</td> </tr> </table>			$x$	:	batas maksimum	$\Delta JFA$	:	Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat	$\Delta JP$	:	Jumlah Penugasan pengawasan
$x$	:	batas maksimum											
$\Delta JFA$	:	Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat											
$\Delta JP$	:	Jumlah Penugasan pengawasan											

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT I**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	TARGET KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan pengawasan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I				1,4%	1. Audit Prioritas dan Program Kerja Cakupan Inspektorat I 2. Reviu Laporan keuangan dan BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I	Rp. 788.241.000,-	16,73%	50,18%	23,00%	10,09%
	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I				8%	1. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I	Rp. 44.000.000,-	45,54%	54,55%	-	-
	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti				85%	-	-	-	-	-	-
	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)IKU				91,5 %	-	-	-	-	-	-
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I				91,5 %	Consulting dan Pelaksanaan Program Kegiatan Cakupan Tugas Inspektorat I	Rp. 486.167.000,-	32,67%	32,67%	32,67%	1,99%



PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL																				
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan dengan standar pelaksanaan pengawasan					75%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)					77%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN																				
Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT					80%				RP. 32.070.000,-		Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I			24,95%	24,95%	24,95%	24,95%	25,18%	24,92%
	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya					90%				RP. 8.320.000,-		Evaluasi Kegiatan Inspektorat I			28,25%	28,25%	28,25%	28,25%	28,25%	15,25%

**CAPAIAN RENCANA AKSI**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I		PIC	KETERANGAN
		RENCANA	REALISASI		
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian				

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II		PIC	KETERANGAN
		RENCANA	REALISASI		
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian				

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III		PIC	KETERANGAN
		RENCANA	REALISASI		
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian				

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV		PIC	KETERANGAN
		RENCANA	REALISASI		
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian				

**CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	TARGET KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>											
Tenwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I				1,4%	1841	Rp. 788.241.000,-	16,73%	50,18%	23,00%	10,09%
					1. Audit Prioritas dan Program Satuan Cakupan Inspektorat I 2. Reviu Laporan keuangan dan BMN dan Penganggaran Satuan Cakupan Inspektorat I		Rp. 246.202.000,-	58,49%	38,99%	-	2,52%

Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I

IKU

1,4%

Untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku

Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah kurang <1,4% dari satu koma empat persen.

$$x \leq 1,4\%$$

dimana

$$x = \frac{\Delta mt}{\Delta \alpha \alpha} \times 100\%$$

x	:	batas maksimum
$\Delta mt$	:	Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian yang bernilai uang
$\Delta \alpha \alpha$	:	total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I

**TEMUAN MATERIAL BPK PEMERIKSAAN TAHUN 2021**

	TEMUAN MATERIAL	TOTAL ANGGARAN
BPSDMI	-	271.296.244.000
SETJEN	-	519.900.000.000



**CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	TARGET KEGIATAN							
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4				
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN															
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I				8%	1. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Kebijakan Industri Satuannya Cakupan Tugas Inspektorat I	Rp. 44.000.000,-				45,54%	54,55%			-

Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I

IKU

8%

Untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun

dimana

$$x = \frac{\Delta TPTD}{\Delta R} \times 100\%$$

dimana

$$x \leq 8\%$$

$$x = \frac{0}{214} \times 100\%$$

x	:	batas maksimum
$\Delta TPTD$	:	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti
$\Delta R$	:	total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun

REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2021			
	SR	BSR	B TPTD
BPSDMI	54	20	111
SETJEN	23	6	93
	214	77	26
			111
			0

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN				TARGET KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4				
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>															
Terwujudnya efektivitas efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti				85%										

Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti IK 85%

**Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas**

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

**Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun**

dimana

$$x \geq 85\%$$

$$x = \frac{\Delta AT}{\Delta AM}$$

dimana

$$x \geq 85\%$$

$$x = \frac{-}{-}$$

x	:	batas maksimum
$\Delta AT$	:	Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi
$\Delta AM$	:	Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem

REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2021		
	Pengawasan	Non Pengawasan
BPSDMI	:	-
SETJEN	:	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN			TARGET KEGIATAN											
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4											
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN																						
Terwujudnya dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)IKU				91,5%	-																

Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat **IKU** **91,5%**

**Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas**  
 Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

**Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jendral yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satuan kerja dibagi dengan jumlah total rekomendasi**

dimana  $x \geq 91,5\%$   
 $x = \frac{\Delta RAHP}{\Delta RHPP} \times 100\%$

dimana  $x \geq 91,5\%$   
 $x = \frac{77}{214} \times 100\%$   
 $= 35,98\%$

:	batas maksimum
ΔRAHP	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jendral yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi
ΔRHPP	total rekomendasi hasil pengawasan

REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2021				
	SR	BSR	B	TPTD
BPSDMI	54	20	111	0
SETJEN	23	6	93	0
	214	77	111	0



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	TARGET KEGIATAN											
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4								
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>																				
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan				75%															

Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan **75%**

**Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas**

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

**Capaian Inspektorat I berdasarkan nilai yang didapatkan dari monitoring yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN				TARGET KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4				
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>															
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)				77%										

Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)		<b>IK</b>	<b>76%</b>
<b>Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas</b>			
Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja			
Menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKA-K/L			

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN											
Terwujudnya Manajemen Pengawasan yang Efektif dan Efisien	Sistem pelaksanaan pengawasan Internal dengan PKPT				80%	Anggaran Kerja Inspektorat I	RP. 32.070.000,-	24,95%	24,95%	25,18%	24,92%

Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT

IK

70%

Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).

dimana

$$x \geq 70\%$$

$$x = \frac{\Delta RSP}{\Delta RP} \times 100\%$$

dimana

$$x \geq 80\%$$

$$x = \frac{86}{96} \times 100\% = 89,58\%$$

$x$	:	batas maksimum
$\Delta RSP$	:	Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT
$\Delta RP$	:	Jumlah rencana Pengawasan

$x$	:	batas maksimum
$\Delta RSP$	:	86
$\Delta RP$	:	95



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	TARGET KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
Terwujudnya Sistem Manajemen yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pengawasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya				90%	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	RP. 8.320.000,-	28,25%	28,25%	28,25%	15.25%

Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya **IK 90%**

Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan dengan sertifikasi JFA

dimana

$$x \geq 80\%$$

$$x = \frac{\Delta JFA}{\Delta JP}$$

dimana

$$x \geq 90\%$$

$$x = \frac{96}{96} = 100\%$$

$x$	:	batas maksimum	:	batas maksimum
$\Delta JFA$	:	Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat	:	96
$\Delta JP$	:	Jumlah Penugasan pengawasan	:	96

Sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat I Tahun 2021. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat I, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian  
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:
  - a. Audit Internal
    - Melaksanakan audit kinerja pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
    - Melaksanakan audit khusus dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
  - b. Reviu
    - Melaksanakan reviu LK-BMN pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
    - Melaksanakan reviu pengadaan barang dan jasa dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
    - Melaksanakan reviu anggaran pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
  - c. Monitoring
    - Melaksanakan penilaian SAKIP unit Eselon II dan UPT pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pendampingan implementasi manajemen resiko, sosialisasi, dan pembinaan pengawasan
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif  
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien  
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan dan menerapkan penjaminan kualitas yang memadai;

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN**

#### **A. Hasil yang Telah Dicapai**

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 sesuai **aplikasi PP39** telah mencapai 99,96% atau sebesar Rp.1.604.358.000,- dari target 100%, sedangkan realisasi fisik sebesar 100% dari target fisik sebesar 100%.

Sesuai dengan aplikasi *e-Monitoring* dan monitoring secara manual, realisasi anggaran Inspektorat I pada Triwulan IV mencapai 18,82% atau sebesar Rp. 302.061.000,- dari target 14,49%.

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada aplikasi PP39 dengan aplikasi *e-Monitoring* yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu penginputan SP2D karena mekanisme TUP. Sementara itu, realisasi fisik kegiatan Inspektorat I sesuai aplikasi *e-Monitoring* telah mencapai 13,39% dari target sebesar 13,23%. Hasil ini masih telah memenuhi rencana kegiatan yang ditargetkan dengan pelaksanaan, dengan yang tidak bisa di triwulan sebelumnya dapat diselesaikan dengan baik sampai dengan akhir triwulan IV.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6.



Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Output	PAGU Anggaran	Triwulan ini		s/d Triwulan Ini		Sisa Anggaran s/d Triwulan IV		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
TAK Layanan Pengawasan Internal	1.605.000.000	13,39	302.061.000	18,82	1.604.358.000	99,96	642.000	0,04

Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Triwulan ini		s/d Triwulan Ini		Sisa Anggaran s/d Triwulan IV			
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Keuangan (Rp,-)	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	
1 Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	788.241.000	13,00	67.000.485	8,5	255.304.000	98,39	-	12.690.680	1,61
2 Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	246.202.000	15,00	1.944.996	0,79	224.956.212	99,89	-	270.822	0,11
3 Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	44.000.000	20,00	1.958.000	4,45	41.998.000	99,91	-	39.600	0,09
4 Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	486.167.000	11,00	42.053.446	8,65	273.188.748	99,95	-	243.083	0,05
6 Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I	32.070.000	16,50	-	-	8.539.591	99,74	-	83.382	0,26
6 Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	8.320.000	45,00	2.159.872	25,96	6.159.820	100	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.605.000.000</b>	<b>13,13</b>	<b>115.078.500</b>	<b>7,17</b>	<b>698.077.828</b>	<b>99,96</b>	<b>-</b>	<b>3.327.568</b>	<b>0,04</b>

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat I pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 (April– Juni 2021) sebagai berikut:

1. Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I, kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:
  - a. Koordinasi Pengawasan dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Audit Pembangunan Gedung PID1 4.0
  - b. Audit Pekerjaan Struktur Gedung di AKOM Solo
  - c. Pengawasan BAST di ATK Jogjakarta
  - d. Audit Kinerja dan Keuangan pada BPSDMI TA 2021;
2. Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I, kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:
  - a. Pembinaan Pengawasan Hibah BMN di Jawa Barat
  - b. Pengawasan Hibah BMN pada Poltek APP Jakarta

## B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat I s/d Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>						
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	IKU	1,4%	0,03%	tercapai
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IK	8%	0%	tercapai
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	85%	100%	tercapai
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	91,5%	35,93%	Tidak tercapai
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	IKU	LEVEL 3	Level 2 (2,77)	Tidak tercapai
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>						
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%	0%	Menurut BPKP Indikator tidak sesuai dengan sehingga tidak dapat dihitung
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	77%	0%	Menurut BPKP Indikator tidak sesuai dengan sehingga tidak dapat dihitung
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>						
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	80%	89,56%	tercapai
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	90%	100%	tercapai



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat I Triwulan IV Tahun 2021 sebagai berikut:

**a. Perspektif Pemangku Kepentingan**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	TARGET KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja tugas Inspektorat I	1841				3. Audit Prioritas dan Program Satuan Kerja Tugas Inspektorat I 4. Reviu Laporan keuangan dan BMN dan Penganggaran dan Penganggaran Satuan Kerja Tugas Inspektorat I	Rp. 788.241.000,-	16,73%	50,18%	23,00%	10,09%
					1,4%						
						Rp. 246.202.000,-	58,49%	38,99%	-	2,52%	

Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I

Untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku

Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah kurang <1,4% dari satu koma empat persen.

$$x \leq 1,4\%$$

$$x = \frac{\Delta mt}{\Delta aa} \times 100\%$$

x	:	batas maksimum
$\Delta mt$	:	Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian yang bernilai uang
$\Delta aa$	:	total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I

TEMUAN MATERIAL BPK PEMERIKSAAN TAHUN 2021	
TEMUAN MATERIAL	TOTAL ANGGARAN
BPSDMI	: 271.296.244.000
SETJEN	: 519.900.000.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	TARGET KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>											
Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I				8%	2. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	Rp. 44.000.000,-	45,54%	54,55%	-	-

Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IKU	8%																								
<p>Untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku</p> <p>Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja</p> <p>Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun</p>																										
$x \leq 8\%$ $x = \frac{\Delta TPTD}{\Delta R} \times 100\%$ <p>dimana</p>	$x \leq 8\%$ <p>dimana</p> $x = \frac{0}{214} \times 100\%$	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2021</th> </tr> <tr> <th></th> <th>SR</th> <th>BSR</th> <th>B</th> <th>TPTD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BPSDMI</td> <td>: 54</td> <td>20</td> <td>111</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SETJEN</td> <td>: 23</td> <td>6</td> <td>93</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>214</td> <td>77</td> <td>111</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2021					SR	BSR	B	TPTD	BPSDMI	: 54	20	111	0	SETJEN	: 23	6	93	0		214	77	111	0
REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2021																										
	SR	BSR	B	TPTD																						
BPSDMI	: 54	20	111	0																						
SETJEN	: 23	6	93	0																						
	214	77	111	0																						
$x \leq 8\%$ $x = \frac{\Delta TPTD}{\Delta R} \times 100\%$ <p>dimana</p>	$x \leq 8\%$ <p>dimana</p> $x = \frac{0}{214} \times 100\%$	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2021</th> </tr> <tr> <th></th> <th>SR</th> <th>BSR</th> <th>B</th> <th>TPTD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BPSDMI</td> <td>: 54</td> <td>20</td> <td>111</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SETJEN</td> <td>: 23</td> <td>6</td> <td>93</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>214</td> <td>77</td> <td>111</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2021					SR	BSR	B	TPTD	BPSDMI	: 54	20	111	0	SETJEN	: 23	6	93	0		214	77	111	0
REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2021																										
	SR	BSR	B	TPTD																						
BPSDMI	: 54	20	111	0																						
SETJEN	: 23	6	93	0																						
	214	77	111	0																						

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN				
		TW1	TW2	TW3	TW4		TW1	TW2	TW3	TW4	
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>											
Terwujudnya efektivitas pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti				85%						

Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti IK 85%

**Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas**

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

**Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun**

dimana

$$x \geq 85\%$$

$$x = \frac{\Delta AT}{\Delta AM}$$

dimana

$$x \geq 85\%$$

$$x = \frac{\Delta AT}{\Delta AM}$$

x	:	batas maksimum
$\Delta AT$	:	Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi
$\Delta AM$	:	Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem

REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2021		
	Pengawasan	Non Pengawasan
BPSDMI	:	
SETJEN	:	



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN				TARGET KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4				
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>															
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)IKU				91,5%	-									

Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat **IKU** **91,5%**

**Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas**

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

**Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satuan kerja dibagi dengan jumlah total rekomendasi**

$$x \geq 91,5\%$$

dimana

$$x = \frac{\Delta RAHP}{\Delta RHP} \times 100\%$$

$$x \geq 91,5\%$$

dimana

$$x = \frac{77}{214} \times 100\% = 35,98\%$$

x	:	batas maksimum
$\Delta RAHP$	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi
$\Delta RHP$	:	total rekomendasi hasil pengawasan

REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2021				
	SR	BSR	B	TPTD
BPSDMI	: 54	20	111	0
SETJEN	: 23	6	93	0
	214	77	26	111
				0

**b. Perspektif Proses Bisnis Internal**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	TARGET KEGIATAN				
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4	
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>													
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan				75%			-		-		-	
Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan									75%				
Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas									IK				
Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja													
Capaian Inspektorat I berdasarkan nilai yang didapatkan dari monitoring yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal													

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	TARGET KEGIATAN					
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4		
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>													
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Berbasis Komputer (TABK) Audit				77%								

Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)		<b>IK</b>	<b>76%</b>
<b>Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas</b>			
Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja			
Menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKA-K/L			



### C. Perspektif Kelembagaan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	TARGET KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>											
Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT				80%	Anggaran Kerja Inspektorat I	RP. 32.070.000,-	24,95%	24,95%	25,18%	24,92%

Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT IK 70%

Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).

dimana

$$x \geq 70\%$$

$$x = \frac{\Delta RSP}{\Delta RP} \times 100\%$$

dimana

$$x \geq 80\%$$

$$x = \frac{86}{96} \times 100\%$$

$$= 89,58\%$$

x	:	batas maksimum
ΔRSP	:	Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT
ΔRP	:	Jumlah rencana Pengawasan

x	:	batas maksimum
ΔRSP	:	86
ΔRP	:	95

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	TARGET KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
Tenwujudnya Sistem Manajemen Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pengawasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya				90%	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	RP. 8.320.000,-	28,25%	28,25%	28,25%	15.25%

Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya **IK 90%**

Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari). Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan dengan sertifikasi JFA

dimana

$$x \geq 80\%$$

$$x = \frac{\Delta JFA}{\Delta JP}$$

dimana

$$x \geq 90\%$$

$$x = \frac{96}{96} = 100\%$$

x	:	batas maksimum
$\Delta JFA$	:	Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat
$\Delta JP$	:	Jumlah Penugasan pengawasan

x	:	batas maksimum
$\Delta JFA$	:	96
$\Delta JP$	:	96

### C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I, terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. secara umum tidak ada kendala yang berarti namun dengan adanya pembatasan akibat dampak covid-19 biaya operasional tidak sesuai dengan rencana.
2. Tidak semua kegiatan dapat mendukung kinerja dikarenakan adanya pemotongan anggaran, sehingga pencapaian kinerja tidak berdampak secara signifikan terhadap kinerja Inspektorat Jenderal.
3. Metode *work from home* berdampak terhadap prosedur dan kegiatan Inspektorat I, yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan mengalami transisi dan perubahan prosedur.



#### **D. Langkah Tindak Lanjut**

Langkah tindak lanjut atas hambatan dan kendala yang dihadapi pada triwulan I untuk meningkatkan kinerja Inspektorat I adalah melalui peningkatan kerjasama yang sinergis antara lain :

1. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
2. Membudayakan pengendalian resiko ke seluruh satuan kerja sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan.
3. Menerapkan prosedur pengawasan yang berbasis system informasi di Inspektorat Jenderal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan IV Tahun 2021 telah berjalan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 sesuai **aplikasi PP39** mencapai 99,96% atau sebesar Rp. 1.604.358.000,- dari target 99,85%, sedangkan realisasi fisik sebesar 100% dari target fisik sebesar 100%.

Sesuai dengan aplikasi **aplikasi PP39**, realisasi anggaran Inspektorat I pada Triwulan IV adalah 18,82% atau sebesar Rp.302.0610.000,- dari target 14,59%, sedangkan realisasi fisik sebesar 13,39% dari target fisik sebesar 13,23%.

Realisasi ini tidak dapat terukur secara *real time* karena terdapat perbedaan cut off data yang menimbulkan perbedaan data yang signifikan dikarenakan jadwal penginputan yang terkendala karena situasi pandemic yang memaksa bukti-bukti fisik yang harus dilampirkan dalam penginputan tertunda penyampaiannya, sehingga data yang terinput belum menunjukkan realisasi secara *real time*.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi, namun berkenaan dengan situasi dan kondisi pandemic pelaksanaan mengikuti kebijakan pemerintah terkait penanggulangan situasi pandemik. Upaya yang dapat dilakukan adalah menciptakan prosedur atau Langkah-langkah tertentu untuk mengatasi masalah-masalah pelaksanaan pekerjaan yang hanya bisa diselesaikan di kantor agar dapat diselesaikan kapan saja dan dimana saja.

## **B. Saran**

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat I.

Demikian Laporan Inspektorat I periode Triwulan IV Tahun 2021 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN**  
**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**TRIWULAN – IV**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**INSPEKTORAT I**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
 TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021  
 INSPEKTORAT I

I. DATA UMUM

- 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
- 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
- 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
- 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen
- 5. Indikator Hasil :
- 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : 1841 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian  
 Cakupan Tugas Inspektorat I
- 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
- 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Wulan Aprilianti Permatasari, S.Kom, M.Si
- 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5
- 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA- 019.06.1.247885/2021

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)			Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah		
1	2	3	4	6	7
TAK Layanan Pengawasan Internal		-	1,605,000		
Total		-	1,605,000	133 Laporan	

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
TAK Layanan Pengawasan Internal	85.81	80.35	86.71	86.87	14.19	18.82	13.29	13.13	#####	99.96	#####	#####	DKI JAKARTA
Jumlah	85.81	80.35	86.71	86.87	14.19	18.82	13.29	13.13	#####	99.96	#####	#####	



IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
		TIDAK ADA KENDALA	-	-

Jakarta Selatan, Januari 2022

Inspektur I Inspektorat Jenderal



Wulan Aprilianti Permatasari, S.Kom, M.Si